

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. PERAN MEDIA CETAK DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA AMBON Said Lestalu	1-17
2. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN Sarifa Niapele	18-26
3. RELEVANSI PEMEKARAN DAERAH DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Johan Tehuayo	27-34
4. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Wahab Tuanaya	5-42
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA Josephus Noya	43-49
6. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Noer Syam Muhrim	50-57
7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU DALAM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TERASING SUKU BUPOLO DI DESA WAEFLAN KECAMATAN WAEAPO In Hutuely	58-70
8. ISLAM, MODAL SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KEPULAUAN Atikah Khairunnisa	71-81
9. PERAN PEMERINTAH ADAT DALAM MANAGEMENT KONFLIK DI TANAH PUTIH Joana J. Tuhumury	82-88
10. SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI SEBAGAI HAMA PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU Elsina Titaley	89-100

11. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon)
Mohamad Arsad Rahawarin _____ 101-112

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON

Noer Syam Muhrim¹

Abstrak

Pertumbuhan kota secara cepat dalam waktu beberapa tahun terakhir, bukan saja merupakan beban yang berat bagi penduduk kota pada umumnya dalam hal pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada, namun juga membuat para pemerintah kota menjadi sulit dalam hal yang berhubungan dengan penyediaan pekerjaan produktif bagi penduduk kota.

Sektor informal sebagai istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, pada masa kini merupakan manifestasi dan situasi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai kota di dunia, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

Kehadiran sektor informal dimana di dalamnya termasuk pedagang kaki lima ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan perkotaan, karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja dan merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk di kota. Dengan demikian sektor pedagang kaki lima yang termasuk sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, juga keberadaannya di kota-kota tanpa bantuan bahkan mungkin malah dengan hambatan-hambatan dari pemerintah, adalah karena adanya kebutuhan akan macam produk dan jasa dihasilkan oleh sektor ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Kaki Lima

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di kota-kota di Indonesia yang lebih cepat dibandingkan dengan di desa memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat pada kota-kota di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi dan pemekaran kota. Keadaan semacam ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibat lainnya telah menyebabkan kelebihan angkatan kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal, (Ramli, 1992:19).

Pertumbuhan kota secara cepat dalam waktu beberapa tahun terakhir, bukan saja merupakan beban yang berat bagi penduduk kota pada umumnya dalam hal pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada, namun juga membuat para pemerintah kota menjadi sulit dalam hal yang berhubungan dengan penyediaan pekerjaan produktif bagi penduduk kota.

¹ Dosen Prodi Administrasi Bisnis, STIA Alazka, Ambon

Sektor informal sebagai istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, pada masa kini merupakan manifestasi dan situasi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai kota di dunia, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

Kehadiran sektor informal dimana di dalamnya termasuk pedagang kaki lima ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan perkotaan, karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja dan merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk di kota. Dengan demikian sektor pedagang kaki lima yang termasuk sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, juga keberadaannya di kota-kota tanpa bantuan bahkan mungkin malah dengan hambatan-hambatan dari pemerintah, adalah karena adanya kebutuhan akan macam produk dan jasa dihasilkan oleh sektor ini.

Adanya sektor informal pedagang kaki lima bukan sekedar karena kurangnya lapangan kerja, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor formal tetapi sektor informal tersebut ada sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi, (Swasono, 1986: 22). Sektor formal yang saat ini terbukti tidak efisien dapat hidup karena faktor formal dapat membayar upah buruh secara murah. Selanjutnya upah rendah ini dapat diterima oleh para buruh karena sektor informal dapat menyediakan kehidupan murah bagi buruh yang berupah rendah ini. Ini menunjukkan bahwa sektor informal telah mensubsidi sektor formal membuat sektor formal mampu hidup atau menjadi variabel disamping sektor informal yang efisien karena dan mampu menyediakan kehidupan murah.

Kekhilafan kultural yang melihat sektor pedagang kaki lima sebagai sektor sampingan, disamping telah menyebabkan belum dipandanginya sektor ini sebagai bagian dan keseluruhan perekonomian secara integratif, menyebabkan pula kebijaksanaan dan penanganan sektor ini lebih bersifat 'penertiban' atau sedikit 'dibina', dengan sendirinya perkataan penertiban akan semakin sedikit terdengar. Keadaan ini disamping seringnya muncul penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap sektor ini sering pula menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang saling bertentangan dan para pejabat-pejabat pemerintah kota dalam menginterpretasikan kebijakan publik terhadap sektor tersebut. Kurangnya upaya-upaya pembangunan dan pembinaan, telah menyebabkan pula sektor ini dengan model kemandiriannya dan vitabilitasnya yang kuat, membangun dirinya diluar sistem dan pola perencanaan resmi baik yang bersifat makro perkotaan maupun mikro sektoral, (Ramli, 1991:25).

Walaupun pandangan terakhir yang positif bagi pedagang kaki lima, namun kenyataan yang masih sering atau bahkan masih terus berlangsung hingga kini adalah pandangan dan banyak pejabat kota ataupun elit lokal yang biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarangan tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang

toko yang tertib dan membayar pajak, serta penyebaran penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor dan basi, (Swasono, 1987:42).

Sebagaimana pada kebanyakan kota di dunia, pedagang kaki lima secara ketat diatur oleh para pejabat kota (Pemerintah Daerah). Berbagai peraturan kota maupun peraturan polisi biasanya menyebutkan atau merinci soal tempat dan syarat berdagang. Para pedagang kaki lima tidak membayar pajak dalam melakukan profesi mereka atau untuk menempati tempat umum, tetapi mereka biasanya membayar sejumlah uang tertentu agar dapat berjualan ; apakah pembayarannya setiap hari atau setiap kali ataupun setiap minggu atau bulan.

Ada pula kota-kota di dunia yang pengaturan pedagang kaki lima dilakukan oleh berbagai departemen atau instansi, sehingga sering terjadi tumpang tindih di dalam tugas pengaturan pedagang kaki lima ini. Hal semacam ini kadang-kadang sering menimbulkan keluhan tentang kekerasan petugas ketertiban kota, sedangkan beberapa pejabat lain menjalankan 'praktek perlindungan' dengan menarik sejumlah uang pada pedagang setiap hari atau setiap minggu dengan menjanjikan kebebasan untuk berdagang. Gangguan-gangguan yang seiring diterima oleh pedagang kaki lima biasanya hanyalah berupa pengusiran, namun bentuk yang paling buruk dan gangguan itu berupa penangkapan besar-besaran yang terorganisir maupun penyitaan barang-barang dagangan mereka oleh petugas-petugas kota.

Dari gambaran diatas, jelaslah bahwa implementasi kebijakan sebagaimana terlihat diatas yang tidak berpihak pada kepentingan publik dalam hal ini para pedagang kaki lima yang menjadi objek sasaran kebijakan pemerintah terkait penataan pasar. Asumsi ini didasari atas bentuk evaluasi kebijakan terutama bentuk kebijakan Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial), dimana bentuk evaluasi ini mengkaji apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ham & hak-hak individu. (Prof. Fachry Kahar)

Atas dasar pemikiran itu maka dapatlah dipertanyakan lebih lanjut tentang apakah evaluasi ini sebenarnya bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan, kemudian diadakan perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan? Atau apakah benar Kebijakan Publik dalam penataan pedagang kaki lima di pasar Mardika berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.? Karena itu, melalui penulisan ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Mardika Kota Ambon

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam materi perkuliahan, Prof Facgri Kahar menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi evaluasi kebijakan yakni : Eksplanasi : menjelaskan realitas pelaksanaan program, Kepatuhan : melihat apakah pelaksanaan sesuai standar

dan prosedur), Auditing: melihat apakah output sampai ke sasaran. Adakah kebocoran dan penyimpangan dan Akunting : apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misal seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan.

Menelaah keempat fungsi evaluasi tersebut bila dikaitkan masalah pedagang kaki lima di pasar mardika Kota Ambon baik suasana kesehariannya ataupun keadaan dan situasi kelangsungan usahanya setelah kebijakan penataan pasar diimplementasikan, maka evaluasi atas implementasi kebijakan mutlak perlu dilakukan. Karena itu, masalah yang dapat dirumuskan adalah : apakah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi masalah kesemrautan pedagang kaki lima telah dilaksanakan, sehingga fungsi evaluasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan ?

C. PEMBAHASAN

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal, menyebabkan inilah sektor informal sering diidentikkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Namun, demikian meskipun penting pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama yang lain. Pedagang kaki lima terletak pada tapal batas penelitian yang tidak didefinisikan secara tepat, antara penelitian kesempatan kerja dan patologi sosial dan cirri-ciri pokoknya ketidaktentuan, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan relatif rendah dan kebanyakan pelakunya sangat mempersulit penelitian, (Bromly, 1978:37).

Kenyataan bahwa pedagang kaki lima relatif hanya sedikit saja dipelajari, menyebabkan pedagang kaki lima hanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas, ataupun sebagai pekerjaan sektor tersier sederhana yang bertambah secara luar biasa di dunia ketiga (Bairoch, 1973:33). Bahkan pandangan yang lebih buruk terhadap pedagang kaki lima yang memandang sebagai parasit dan sumber pelaku ataupun benar-benar pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur dan pencuri yang tergolong dalam 'rakyat jelata' atau semata-mata dianggap sebagai 'jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan', (Roggero, 1976:52). Pandangan lain yang baik adalah mereka yang berpandangan bahwa pedagang kaki lima sebagai korban dan langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota. Ia dipandang sebagai suatu jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa-kota yang besar, pertumbuhan penduduk kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang

lambat dalam sektor industri, dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja, (Bromley, 1978:38).

Salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi kebijakan adalah monitoring. Dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara (immediate result) direkam untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi atau penilaian kebijakan adalah merupakan langkah terakhir tidak hanya dilakukan untuk mengikuti isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya, formulasi usulan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan seterusnya.

Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku orang-orang yang bertanggung terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berda diluar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk mempertimbangkan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program, serta mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada pihak yang mensponsori program tersebut (Rossi & Freeman, 1993).

Anderson mengatakan bahwa evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Jones mendefenisikan evaluasi kebijakan adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda-beda secara tajam tentang spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Dari sudut spesifikasi obyeknya berarti menilai hasil berbagi macam program-program pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi masyarakat, misalnya: masalah perumahan, kesehatan, lingkungan ketenagakerjaan dan sebagainya. Darisudut teknik pengukurannya yaitu cara-cara untuk menilai program-program pemerintah mulai dari teknik yang bersifat impresionistis (kesan-kesan observatif) sampai dengan teknik yang ilmiah dan sistematis dengan segala macam patokan-patokan yang canggih. Dari sudut metode analisisnya yaitu menunjukkan hasil akhir (kesimpulan) dari kegiatan menilai program pemerintah tersebut: apakah program tersebut efektif atau tidak; memberikan dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya dan seterusnya.

Keban (2008) mengatakan, untuk dapat melakukan evaluasi, diperlukan rincian tentang apa yang perlu dievaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh dengan mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan output dan outcome yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan suatu program. Hubungan sebab-akibat harus

diteliti secara cermat antara kegiatan program dengan output dan outcome yang nampak. Pertanyaan kunci yang sering diungkapkan dalam suatu proses evaluasi adalah apakah outcome yang muncul merupakan hasil dari pelaksanaan program yang ada, atau dari faktor-faktor lain di luar program tersebut. Misalnya, apakah income masyarakat pedesaan yang meningkat pada dua tahun terakhir benar-benar dipengaruhi oleh partisipasi mereka dalam program pembangunan Kecamatan, atau faktor lain. Kalau memang dipengaruhi faktor lain, maka evaluator tidak dapat mengklaim bahwa program tersebut telah efektif.

Kegiatan penilaian pada fase proses kebijakan manapun mencakup 3 macam kegiatan yang berbeda, yaitu ; (1) *Objection*, artinya objek kebijakan apa yang akan dinilai, misalnya menentukan keberhasilan program pembangunan perumahan yang dibangun oleh sebuah Perusahaan, (2) *Measurement*, artinya memilih teknik-teknik pengukuran yang tepat untuk menilai hasil evaluasi terhadap objek kebijakan, baik yang bersifat impresionistis ataupun sistematis dan ilmiah, misalnya penggunaan metode survei untuk mengukur segi kemanfaatan (*use factor*) Puskesmas bagi masyarakat desa, atau metode kunjungan anggota DPRD ke rumah sakit untuk mengetahui tingkat pelayanan kepada masyarakat., (3) *Analysis*, yaitu menganalisis informasi-inforinasi yang telah disajikan tadi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tentang efektif tidaknya program-program pemerintah yang dinilai tadi, misalnya analisis tentang kemampuan daya tampung perguruan tinggi negeri pada tahun akademis tertentu.

Sebagian besar kegiatan menilai kebijakan publik dilakukan oleh pembuat kebijakan formal, seperti pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif dan seterusnya. Hasil penilaian yang mereka peroleh seringkali bersifat "politis" dan mempunyai kecenderungan-kecenderungan tertentu (*value laden*)". Nilai-nilai ideologis dan pribadi (*idiological and personal values*) seringkali sangat berpengaruh terhadap obyektivitas penilaian kebijakan negara. Kriteria-kriteria ilmiah yang cenderung mempertinggi tingkat obyektivitas hasil penilaian seringkali terabaikan atau jarang sekali dipakai.

Secara informal, penilaian kebijakan sebagian juga dilakukan oleh unsur-unsur diluar pemerintah, seperti misalnya oleh para ahli ilmu politik, ekonomi, sosial dan seterusnya, media massa (terutama yang non pemerintah); kelompok kepentingan, partai politik, warga negara dan sebagainya. Penilaian mereka kebanyakan didasarkan atas penglihatan mereka terhadap pelaksanaan secara nyata dan konskuensi-konskuensi yang menyertai implementasi kebijakan tersebut. Seringkali penilaiannya bersifat sangat "tajam" (*dear cut evaluation*) terutama kepekaan mereka terhadap kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat secara luas.

Teknik evaluasi yang sistematis dan ilmiah semakin mempunyai kecenderungan banyak dipakai, karena dengan kemampuannya untuk

mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat akan menghasilkan kesimpulan hasil penilaian yang akurat pula. Teknik inilah yang sekarang banyak dibutuhkan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan akan dapat dikenal tingkat efektivitas kebijakan-kebijakan publik dan nantinya juga akan dipakai sebagai masukan-masukan baru dalam rangka memutuskan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik.

D. KESIMPULAN

Untuk dapat melakukan evaluasi kebijakan negara/pemerintah (publik), ada 7 kriteria harus dipenuhi: (1) Relevansi. Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan dan harus dapat menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat, (2) Signifikansi. Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi baru dan penting bagi para pelaku kebijakan melebihi dari hal-hal yang selama ini mereka anggap telah jelas dan terang, (3) Validitas. Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program, (4) Reliabilitas. Evaluasi kebijakan harus dapat membuktikan bahwa kesimpulan hasil evaluasi tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan konsisten, (5) Objektivitas. Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak memihak (bias), yaitu informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama, (6) Ketetapan waktu. Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi tepat, pada waktunya (pada waktu keputusan harus dibuat), (7) Daya guna. Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang bias dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain.

Penerapan evaluasi kebijakan secara sistematis dan ilmiah menuntut perumus kebijakan (yang berfungsi juga sebagai penilai kebijakan) melakukan pengumpulan dan analisa data secara akurat. Metode pengumpulan data dan penganalisa data untuk maksud-maksud penilaian kebijakan dapat dipergunakan pula metodologi penelitian yang ilmiah (scientific evaluative research). Untuk itu evaluator perlu ; (1) melakukan identifikasi tujuan-tujuan yang akan dinilai ; (2) menganalisis problem-problem yang timbul dimana aktivitas penilaian perlu ditujukan ke arah itu; (3) memperjelas gambaran (deskripsi) dan standarisasi aktivitas penilaian; (4) pengukuran tingkat perubahan yang terjadi; (5) menetapkan apakah perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya aktivitas penilaian atau sebab-sebab lain, dan (6) menunjukkan indikator keberlangsungan (kontinuitas) hasil-hasil penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles E. Lindblom, Proses Penetapan kebijaksanaan, Edisi Kedua Penerjemah Ardin Syamsudin, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Dewayanti, 2002, Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penanggulangan Pedagang Kaki Lima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Edi Suharto; Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Fachri Kahar, materi Perkualihan
- Hidayat, 1993, Kewirausahaan, Intermedi, Jakarta.
- M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1984.
- , Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul 1-9 UT, Jakarta, 1999.
- Mangoi Ronald, 1980, Menentukan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Pemasaran, Rajawali, Jakarta.
- M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijakan Negara, Liberty Yogyakarta, 1989.
- PERDA (Peraturan Daerah) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum
- PERDA nomor 7 tahun 2003 tentang pelayanan pasar
- Surat Pemberitahuan nomor 30/peng/21/2006 tentang batas waktu pembongkaran kios milik pedagang kaki lima
- Soemardi, 1987, Pengantar Bisnis Modern, Edisi Revisi ke VIII, Rineka Cipta, Jakarta.